



# LAPORAN KEUANGAN

**TAHUN 2024 PERIODE 14/ADJ 2 - AUDITED**

**Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
**Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber**  
**Daya Manusia KP**

**Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP**  
**032.12.0200.653526 (KD)**



Jalan Raya 2 Sukamandi – Ciasem Subang 421256



(0260) 520996,523364



[www.kkp.go.id/bdasukamandi](http://www.kkp.go.id/bdasukamandi)



[bdakp.sukamandi@kkp.go.id](mailto:bdakp.sukamandi@kkp.go.id)

**BALAI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN APARATUR  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
032.12.0200.653526 (KD)**

**Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024**

Untuk Periode 14 ADJ 2 - *AUDITED*

Jl. Raya 2 Sukamandi Ciasem 41256 Subang

Telp. 0260-520996, fax. 0260-523364

LAMAN [www.kkp.go.id/bdasukamandi](http://www.kkp.go.id/bdasukamandi)

SUREL [bdakkp.sukamandi@kkp.go.id](mailto:bdakkp.sukamandi@kkp.go.id)

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Subang, 8 Mei 2025  
Kepala Balai  
  
R.Herman Mahardhika

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	35
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	51
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	60
F. Pengungkapan Lain – Lain.....	64
Lampiran.	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI CIASEM SUBANG JAWA BARAT 41256  
TELEPON. (0260) 520 996, FAKSIMILE (0260) 523 364  
LAMAN [www.kkp.go.id/bdasukamandi](http://www.kkp.go.id/bdasukamandi) SUREL [bdakp.sukamandi@kkp.go.id](mailto:bdakp.sukamandi@kkp.go.id)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2024 Periode 14 ADJ 2 **AUDITED** yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Subang, 8 Mei 2025  
Kepala Balai



R. Hernan Mahardhika

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/20015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp926.940.267,00 atau mencapai 107,28 persen dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp864.000.000,00

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp16.094.636.000,00 atau mencapai 99,56 persen dari alokasi anggaran senilai Rp16.165.261.000,00.

## **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan senilai Rp51.894.913.196,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp3.200.000,00 ; Piutang Jangka Panjang (neto) senilai Rp0 ; Aset Tetap (neto) senilai Rp51.833.098.696,00 ; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp58.614.500,00  
Nilai Kewajiban senilai Rp131.234.014,00 dan Ekuitas senilai Rp51.763.679.182,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp893.491.600,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah senilai Rp16.654.309.841,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp15.760.818.241,00. Surplus Kegiatan Non Operasional senilai Rp17.769.061,00 dan Pos Luar Biasa senilai Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp15.743.049.180,00

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah senilai Rp52.285.204.223,00 dikurangi Defisit-LO senilai Rp15.743.049.180 kemudian dikurangi dengan koreksi – koreksi senilai Rp.0,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp15.221.524.139,00. Dengan demikian terdapat penurunan ekuitas senilai Rp521.525.041,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp51.763.679.182,00.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2024, nilai aset, Kewajiban, Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2024		% thd Angg	TA.2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	864,000,000	926,940,267	107.28	110,952,311
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>864,000,000</b>	<b>926,940,267</b>	<b>107.28</b>	<b>110,952,311</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	6,169,261,000	6,131,724,505	99.39	5,626,810,872
Belanja Barang	B.4	9,996,000,000	9,962,912,351	99.67	4,172,592,802
Belanja Modal	B.5				
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>16,165,261,000</b>	<b>16,094,636,856</b>	<b>99.56</b>	<b>9,799,403,674</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NERACA  
PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	2,063,250
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	(10,316)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	3,200,000	4,135,000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3,200,000</b>	<b>6,187,934</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	33,494,218,000	33,494,218,000
Peralatan dan Mesin	C.15	10,816,057,285	12,169,081,025
Gedung dan Bangunan	C.16	18,309,414,391	18,309,414,391
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	3,359,729,000	3,359,729,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	125,368,000	125,368,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(14,802,942,755)	(15,144,971,892)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>51,301,843,921</b>	<b>52,312,838,524</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.23	58,614,500	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>58,614,500</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>51,363,658,421</b>	<b>52,319,026,458</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	121,310,814	33,822,235
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	9,923,200	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		131,234,014	33,822,235
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>131,234,014</b>	<b>33,822,235</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	51,232,424,407	52,285,204,223
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>51,232,424,407</b>	<b>52,285,204,223</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>51,363,658,421</b>	<b>52,319,026,458</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	893,491,600	922,430,630
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>893,491,600</b>	<b>922,430,630</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	6,131,724,505	5,642,726,972
Beban Persediaan	D.3	40,682,500	49,082,128
Beban Barang dan Jasa	D.4	6,342,991,010	5,035,983,607
Beban Pemeliharaan	D.5	2,149,939,646	3,189,090,625
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,459,108,274	712,509,944
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	529,874,222	1,132,430,157
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(10,316)	10,316
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>16,654,309,841</b>	<b>15,761,833,749</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(15,760,818,241)</b>	<b>(14,839,403,119)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS /(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset	D.11	(10,550,590)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	(3,693,156)	-
Jumlah Surplus /(defisit) Pelepasan Aset		6,857,434	-
<b>SURPLUS /(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14	-	-
Jumlah Surplus /(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
<b>SURPLUS /(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	(10,911,627)	-
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	-
Jumlah Surplus/(defisit)dari kegiatan Non operasional lainnya		10,911,627	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>17,769,061</b>	<b>-</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.17	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(15,743,049,180)</b>	<b>(14,839,403,119)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	52,285,204,223	52,362,160,267
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(15,743,049,180.00)	(14,237,826,057.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	15,221,524,139	14,762,447,075
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(521,525,041)	(76,956,044)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>51,763,679,182</b>	<b>52,285,204,223</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

##### a. Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya Kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Peran penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan (KP) dalam hal ini adalah dalam rangka mendukung ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan dan penguatan faktor input berupa sumber daya manusia (SDM) sebagai penentu keberhasilan peningkatan produksi perikanan. Penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pendirian Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) didorong oleh kebutuhan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan aparatur yang kompeten dan profesional baik dalam hal manajerial maupun teknis dalam rangka mendukung agenda pemerintah sebagaimana tersebut di atas. Terlebih kepada aparatur yang menduduki jabatan pimpinan dalam bidang manajemen, serta aparatur pejabat fungsional dalam meningkatkan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugasnya. Pemenuhan kompetensi manajerial bagi pimpinan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi pejabat eselon III dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi pejabat eselon IV yang

diselenggarakan oleh BPPA. Sedangkan pemenuhan kompetensi teknis bagi pejabat fungsional diperoleh melalui penyelenggaraan diklat dasar maupun teknis. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan aparatur yang handal, BPPA mengembangkan pelayanan diklat tidak hanya kepada aparatur lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga kepada aparatur instansi lain seperti aparatur Pemerintah Daerah, Penyuluh Perikanan Daerah maupun aparatur dari Kementerian atau Lembaga lain.



## b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

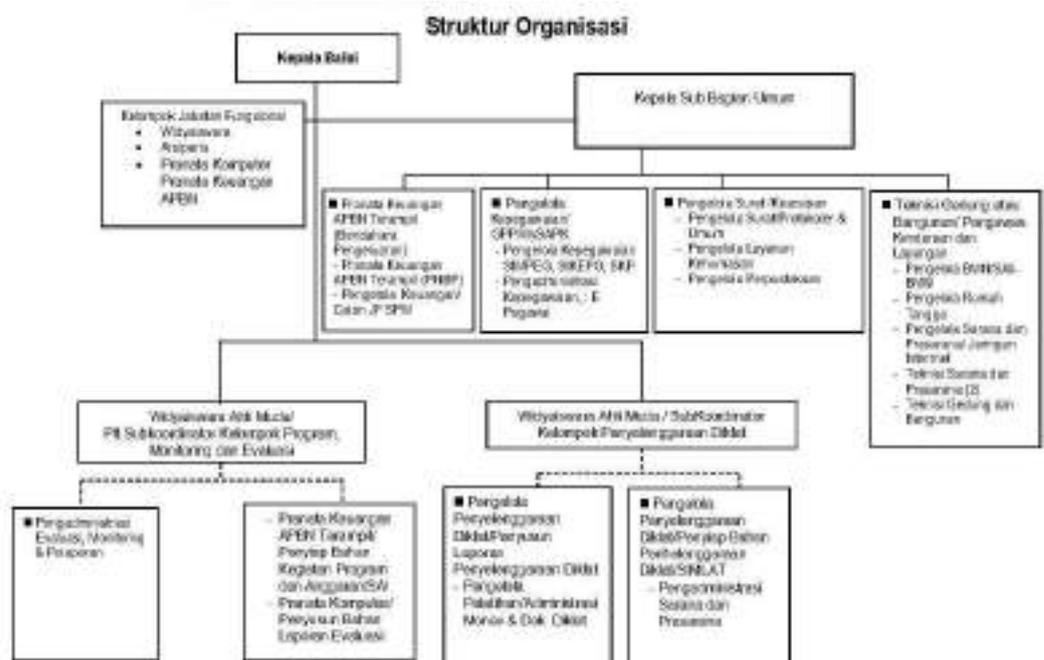
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/ PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan penyiapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan administrasi kediklatan.
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPA dipimpin oleh Kepala Balai dan dibantu oleh struktur yaitu :

1. Subbagian uMUM
2. Subkoordinator Penyelenggaraan Diklat
3. Subkoordinator Program, Monitoring dan Evaluasi

Struktur organisasi BDA KKP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, adalah sebagaimana berikut :



Dalam rangka memenuhi tugas organisasi, BPPA melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan diklat sebagai berikut :

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrasi bagi aparatur yang menduduki jabatan pimpinan manajemen eselon III lingkup KKP dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi aparatur yang menduduki jabatan pimpinan manajemen eselon IV lingkup KKP
2. Diklat Dasar (LATSAR) CPNS bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka membekali nilai-nilai dasar serta peran dan kedudukan PNS dalam pemerintahan.
3. Diklat Teknis Fungsional bagi aparatur yang menduduki jabatan fungsional tertentu dalam rangka memberikan keterampilan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Diklat Teknis bagi aparatur baik fungsional tertentu maupun fungsional umum dalam rangka meningkatkan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas pada unit kerja masing-masing.

### **c. Keragaman SDM**

Per tanggal 31 Desember 2023 jumlah Pegawai yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi sebanyak 45 orang pegawai yang terdiri dari 37 orang PNS aktif dan 8 tenaga kontrak. Selain itu pada BPPA Sukamandi juga memiliki tenaga *Outsourcing* sebanyak 9 orang terdiri dari 2 orang sebagai petugas kebersihan lingkungan dan 7 orang sebagai petugas keamanan kantor. Dari jumlah pegawai yang aktif masing – masing ditempatkan pada bagian sebagai berikut:

1. Kepala Balai ( 1 Orang ),
2. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak orang PNS dan 18 orang
3. Kelompok Jabatan Fungsional (Widyaiswara) sebanyak 14 orang PNS
4. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Komputer) sebanyak 1 (satu) orang, yang diperbantukan juga di Sub Koordinator Program, Monitoring dan Evaluasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Keuangan APBN) sebanyak 3 (tiga) orang

#### d. Sistem Informasi yang dipergunakan

Sistem Informasi yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Aplikasi SAKTI, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit
2. Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Aplikasi SPSE, aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;

4. SIMPONI, aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBPN dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi adalah sebagai berikut:

***Pendapatan-  
LRA***

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

***Pendapatan-  
LO***

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA-032.12.2.653526/2024 revisi ke-6 tanggal 30 Nopember 2024 DS:6342-6287-3772-1800 Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendapatkan alokasi Pagu APBN sebesar Rp15.703.761.000,00 untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2024, dengan sumber dana anggaran sebagai berikut:

**Tabel B.1**

### Rincian Pagu Anggaran Menurut Program Tahun Anggaran 2024

Uraian	Pendapatan Jasa		Belanja		
	Pendapatan Jasa	Pendapatan Lain-lain	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Jumlah Belanja
Anggaran Awal	639,360,000		6,619,261,000	8,996,000,000	15,615,261,000
Anggaran Revisi I	639,360,000		6,619,261,000	8,996,000,000	15,615,261,000
Anggaran Revisi II	639,360,000		6,619,261,000	8,996,000,000	15,615,261,000
Anggaran Revisi III	639,360,000		6,619,261,000	8,996,000,000	15,615,261,000
Anggaran Revisi IV	639,360,000		6,619,261,000	8,996,000,000	15,615,261,000
Anggaran Revisi V	639,360,000		6,619,261,000	9,996,000,000	16,615,261,000
Anggaran Revisi VI	639,360,000		6,619,261,000	9,996,000,000	16,615,261,000
Anggaran Revisi VII	639,360,000		6,619,261,000	9,996,000,000	16,615,261,000
Anggaran Revisi VIII	639,360,000		6,169,261,000	9,996,000,000	16,165,261,000
Anggaran Revisi IX	639,360,000		6,169,261,000	9,996,000,000	16,165,261,000

Dari sumber dana anggaran tersebut diketahui Balai Dik telah melakukan revisi anggaran sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu No.S-24/WPB.13/2024 Tanggal 5 Januari 2024, terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;

2. Revisi ke-2 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-1039/WPB.13/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;
3. Revisi ke-3 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-2005/WPB.13/2024 pada tanggal 22 April 2024 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;
4. Revisi ke-4 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-2533/WPB.13/2024 pada tanggal 26 April 2024 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;
5. Revisi ke-5 sesuai dengan surat pengesahan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan No.S-213/PB.2/2024 pada tanggal 7 Juni 2024 terdapat penambahan pagu anggaran senilai Rp1.000.000.000,00 untuk operasional perkantoran dengan pagu anggaran semula Rp15.615.261.000,00 menjadi Rp16.615.261.000,00
6. Revisi ke-6 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-4485/WPB.13/2024 pada tanggal 15 Agustus 2024 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;
7. Revisi ke-7 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen

Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-4843/WPB.13/2024 pada tanggal 24 September 2024 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;

8. Revisi ke-8 sesuai dengan surat pengesahan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan No.S-754/AG/AG.3/2024 pada tanggal 5 Oktober 2024 terdapat pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam 1 program dalam rangka memenuhi belanja pegawai lingkup BPPSDMKP;
9. Revisi ke-9 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Perbendaharaan Prov.Jawa Barat Kementerian Keuangan No.S-6571/WPB.13/2024 pada tanggal 22 November 2024, revisi dilaksanakan dalam rangka melaksanakan penghematan/*self blocking* sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024;

**Tabel B.2**

**Rincian Pagu Anggaran BDA KP TA.2024**

Uraian	DIPA 2024	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	864,000,000	864,000,000
Pendapatan Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>864,000,000</b>	<b>864,000,000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	6,619,261,000	6,169,261,000
Belanja Barang	8,996,000,000	9,996,000,000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15,615,261,000</b>	<b>16,165,261,000</b>

**Realisasi  
Pendapatan  
Rp926.940.267,00**

**B.1 Pendapatan dan Hibah**

Realisasi Pendapatan untuk periode semester II TA 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp926.940.267,00 atau mencapai 107,28 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp864.000.000,00. Pendapatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Sukamandi terdiri dari :

**Tabel B.4**  
**Rincian Estimasi dan Relisasi Pendapatan**  
**Per 31 Desember 2024**

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari penjualan Perlatan dan mesin		10,550,590	
Pendapatan Sewa Tanah, gedung, dan Bangunan	-	36,487,800	
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	60,000,000	23,200,000	
Pendapatan dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	804,000,000	843,727,000	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		2,063,250	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		10,911,627	
<b>Jumlah</b>	<b>864,000,000</b>	<b>926,940,267</b>	<b>107.3</b>

Realisasi Pendapatan Balai Diklat Aparatur KP terdiri dari :

- a. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp10.550.590,00 yang merupakan hasil lelang peralatan dan mesin yang keadaannya sudah rusak berat;
- b. Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp36.487.800,00 yang didapatkan dari hasil sewa rumah dinas yang dihuni sebagian pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi sesuai dengan Surat Perintah Kepala Balai No.SP.21/BDA/KU.440/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penempatan dan Sewa Rumah Dinas Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2024;
- c. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp23.200.000 didapatkan dari eksternal yang memanfaatkan sarana dan prasarana Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan jumlah tarif sesuai Peraturan Presiden No.85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan senilai

Rp843.727.000,- yang merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional binaan KKP yang diikuti oleh pegawai dinas Provinsi dan Kabupaten di Indonesia;
  - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang berasal dari pegawai Pemerintah Kabupaten Malang;
  - Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS yang berasal dari Kemendikbudristek
- e. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu senilai Rp2.063.250,00 yang merupakan setoran kelebihan pembayaran tunjangan;
- f. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu senilai Rp10.911.627,00 yang merupakan setoran kelebihan pembayaran pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun 2023 berdasarkan dari hasil temuan audit kinerja APIP

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 naik 0,61 persen dibandingkan Tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya Pendapatan dari layanan pendidikan dan pelatihan dasar CPNS dari Kemendikbudristek yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan juga adanya sewa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi berupa sewa asrama dan lain-lain untuk kegiatan pelatihan. Semua transaksi pendapatan menggunakan surat billing dari aplikasi [www.simponi.kemenkeu.go.id](http://www.simponi.kemenkeu.go.id)

**Tabel B.5**

**Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	913,965,390	921,288,030	(0.79)
Pendapatan Lain-lain	12,974,877	-	
<b>Jumlah</b>	<b>926,940,267</b>	<b>921,288,030</b>	<b>0.61</b>

**Realisasi Belanja B.2 Belanja**

**Negara**

**Rp16.094.636.856**

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp16.094.636.856,00 atau 99,56 persen dari anggaran belanja senilai

Rp16.165.261.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel B.6**

***Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024***

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6,169,261,000	6,132,351,331	99.40
Belanja Barang	9,996,000,000	9,977,378,964	99.81
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>16,165,261,000</b>	<b>16,109,730,295</b>	<b>99.66</b>
Pengembalian		15,093,439	-
<b>Jumlah</b>	<b>16,165,261,000</b>	<b>16,094,636,856</b>	<b>99.56</b>

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan senilai 2,76 persen, hal ini dikarenakan :

1. Adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 26 Januari;
2. Adanya tambahan anggaran operasional dari satker lingkup BPPSDM KP yang direalisasikan untuk belanja pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur senilai Rp1.000.000.000,00

Berikut ini adalah perbandingan rincian realisasi belanja TA.2024 dan TA 2023

**Tabel B.7**

**Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,131,724,505	5,644,790,222	8.63
Belanja Barang	9,962,912,351	8,981,810,078	10.92
Belanja Modal		1,035,919,900	-
<b>Jumlah</b>	<b>16,094,636,856</b>	<b>15,662,520,200</b>	<b>2.76</b>

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp6.131.724.505,00 dan Rp5.644.790.910,00. Jumlah pengembalian belanja pegawai per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp626.826,00.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Tabel B.8****Rincian Pengembalian Belanja Pegawai TA.2024**

No.	Uraian	No.Dokumen	Tanggal setor	Akun	Jumlah
1	Pengembalian Belanja pembulatan Gaji PNS			511119	822
2	Pengembalian Belanja tunjangan umum PNS			511151	555,000
3	Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS	CB4317N1PH0V7TRH	31-12-24	512411	71,004
<b>JUMLAH</b>					<b>626,826</b>

**Tabel B.9****Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,131,100,000	1,929,026,100	10.48
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,863	26,130	14.29
Belanja Tunj.Suami/istri PNS	200,043,560	187,318,890	6.79
Belanja Tunj.Anak PNS	53,946,924	48,945,388	10.22
Belanja Tunj.Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	-
Belanja Tunj.Fungsional PNS	254,628,000	278,820,000	(8.68)
Belanja Tunj.PPh PNS	30,305,232	12,165,336	149.11
Belanja Tunj.Beras PNS	122,462,220	123,548,520	(0.88)
Belanja Tunj.Makan PNS	239,185,000	261,088,000	(8.39)
Belanja Tunj.Umum PNS	45,920,000	46,260,000	(0.73)
Belanja Uang Lembur	3,064,000	0	
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	3,026,466,532	2,732,392,546	10.76
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6,132,351,331</b>	<b>5,644,790,910</b>	<b>8.64</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(626,826)	(688)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6,131,724,505</b>	<b>5,644,790,222</b>	<b>8.63</b>

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan senilai 8,63 persen dari tahun anggaran 2023, karena adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 26 Januari.

**Belanja Barang**      **B.4 Belanja Barang**

**Rp16.094.636.856**

,-

Realisasi Belanja Barang pada tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp16.094.636.856,00 dan Rp8.981.810.078,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Jika dibandingkan realisasi belanja barang pada Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2023, maka pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar 10,92 persen, hal ini antara lain disebabkan :

- Adanya tambahan anggaran operasional dari satker lingkup BPPSDM KP berupa belanja barang yang direalisasikan untuk

belanja pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

- Pada tahun 2024 target output kegiatan Diklat lebih besar dari pada tahun 2023 yaitu dengan jumlah 5.165 orang dengan anggaran senilai Rp5.500.000.000,00. Dengan anggaran tersebut Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi telah berhasil melatih ASN KKP dengan metode diklat Blended learning maupun full online training (*emilea*) sebanyak 6.204 orang peserta atau 120 persen dari target yang ada.

**Tabel B.10**  
**Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	586,258,066	859,727,081	(31.81)
Belanja Barang Non Operasional	3,266,638,016	1,569,606,567	108.12
Belanja Jasa	2,461,220,849	2,601,491,233	(5.39)
Belanja Pemeliharaan	2,159,971,259	3,189,090,625	(32.27)
Belanja Perjalanan	1,463,543,274	714,099,944	104.95
Belanja Barang Persediaan	39,747,500	49,384,628	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9,977,378,964</b>	<b>8,983,400,078</b>	<b>11.06</b>
Pengembalian Belanja	14,466,613	1,590,000	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9,962,912,351</b>	<b>8,981,810,078</b>	<b>10.92</b>

*Belanja Modal*  
*Rp,00*

### ***B.5 Belanja Modal***

Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp1.035.919.900,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**Tabel B.11**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,035,919,900	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>1,035,919,900</b>	<b>-</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>1,035,919,900</b>	<b>-</b>

Belanja modal  
Tanah  
Rp0,00

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan senilai 0 persen dibandingkan tahun anggaran 2023.

**Tabel B.12**

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	
Belanja Modal BLU	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024 adalah senilai Rp0,00 , terdapat penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 yaitu Rp1.035.919.900. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

**Tabel B.13**

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

### TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit / Laptop	-	0.00	0.00
Peralatan	-	415,419,900	0.00
Kendaraan bermotor	-	620,500,000	0.00
Belanja Modal BLU	-	0.00	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*Belanja Modal gedung dan bangunan Rp0*

#### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Untuk anggaran tahun 2023 Balai Diklat Aparatur KP tidak terdapat pengadaan belanja modal gedung dan bangunan.

**Tabel B.14**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan**  
**TA 2024 dan 2023**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

*Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0*

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan senilai 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2023.

**Tabel B.15**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**TA 2024 dan 2023**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Belanja  
Modal  
Lainnya Rp0**

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 mengalami kenaikan senilai 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2023

**Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0,00**

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel C.1**

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023**

Keterangan	2024	2023
Uang Tunai	-	-
Kwitansi UP	-	-
BANK PT.BRI PERSERO NO.REK.0355-01-000137-30-7	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0,00*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Tabel C.2**

**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023**

Keterangan	2024	2023
Uang Tunai	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp0,00*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNBP  
Rp0,00*

### **4 Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp.2.063.250,00 Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

**Tabel C.4**

**Rincian Piutang PNBP TA 2024 dan 2023**

<b>Uraian</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Piutang PNBP	-	2,063,250
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2,063,250</b>

*Bagian Lancar  
Tagihan  
TP/TGR  
Rp.0,00*

### **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.



**Tabel C.8**  
**Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023**

Jenis	2023	2022
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp0,00*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00 , merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

**Tabel C.9**  
**Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
TA 2024 dan 2023**

Jenis	2023	2022
<b>Jumlah</b>	-	-

*Persediaan  
Rp3.200.000,00*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp3.200.000,00 dan Rp4.135.000,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan nilai persediaan pada 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023 maka nilai persediaan pada 31 Desember Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.10**  
**Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023**

Jenis	2024	2023
Barang Konsumsi	3,200,000	4,135,000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya		
<b>Jumlah</b>	<b>3,200,000</b>	<b>4,135,000</b>

Barang persediaan pada Balai Diklat Aparatur KP pada Laporan Persediaan Tahun 2024 berupa barang – barang konsumsi yaitu alat-alat tulis kantor, bahan komputer atau kebutuhan kantor lainnya, obat-obatan poliklinik. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0,00 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Berikut ini rincian mutasi persediaan per 31 Desember 2024 :

<b>Saldo Awal Persediaan Per 31 Desember 2023</b>	<b>4,135,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	39,747,500
Pembelian	39,747,500
Reklas Masuk	0
<b>Mutasi kurang:</b>	40,682,500
Pemakaian	40,682,500
Reklas Keluar	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>3,200,000</b>

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0,00*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0,00*

### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

**Tabel C.12**

**Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023**

No	Debitur	2023	2022
1			
2			
<b>Jumlah</b>		-	-

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0,00

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah  
Rp33.494.218.000

### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp33.494.218.000,00 dan 33.494.218.00,00 atau Tidak ada penambahan atas pengadaan tanah.

Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP total memiliki Tanah Bangunan Kantor Pemerintah No KIB.1212001 dengan luas 35,751 m2 senilai Rp33.494.218.000 telah menyerahkan sertifikat Tanah Atas Nama Pemerintah RI cq Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kabag. Keuangan dan Umum BRSDMKP dengan Berita Acara SerahTerima Nomor : 209/BRSDM-BDA/PL.930/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 bertempat di kantor Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>33,494,218,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Revaluasi Aset	0
Pembelian	0
<b>Mutasi kurang:</b>	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>33,494,218,000</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp10.816.057.285

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp10.816.057.285,00 dan per 31 Desember 2023 adalah

Rp12.169.081.025,00 . Terdapat mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>12,169,081,025</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>105,983,250</b>
Pembelian	
Pengembangan Aset	
Transfer Masuk	105,983,250
Reklasifikasi Masuk	-
Koreksi tambah	-
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>1,459,006,990.00</b>
Transfer Keluar	77,794,000
Penghentian Aset dari Penggunaannya	1,381,212,990
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>10,816,057,285</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	9,382,544,287
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>1,433,512,998</b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebanyak 3.136 unit senilai Rp10.816.057.285,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebanyak 3.418 unit senilai Rp12.169.081.025,00, mutasi kurang sebanyak 309 unit senilai Rp1.459.006.990,00 dan mutasi tambah sebanyak 27 unit dengan nilai Rp105.983.250,00.

Mutasi tambah yang terdiri transfer masuk pada tahun anggaran 2024 dari Biro Umum dan PBJ KKP berupa kursi besi/metal sebanyak 27 unit senilai Rp105.983.250,00 dengan BAST No.B.3843/SJ.6/PL.450/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024;

Uraian Mutasi Keluar Peralatan dan Mesin pada periode tahun 2024 yaitu berupa :

- a. Transfer Keluar Barang Milik Negara berupa perkakas kantor lainnya ke Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi dengan BAST nomor: B.489/BDA/PL.110/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebanyak 1 unit dengan nilai Rp32.821.000,00

- b. Transfer Keluar Barang Milik Negara berupa Alat kantor, alat peraga pelatihan dan percontohan, peralatan olah raga ke Politeknik KP Karawang dengan BAST Nomor BAST: B.470/BDA/PL.110/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebanyak 51 unit dengan nilai 44.973.000,00
- c. Penghentian aset dari penggunaannya Barang Milik Negara sebanyak 257 unit senilai Rp1.381.212.990,00.

**Gedung dan Bangunan**

*Rp.18.309.414.391*

**C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp18.309.414.391,00 dan 2023 adalah Rp18.309.414.391. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>18,309,414,391</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	-
Pengadaan	-
Reklasifikasi Masuk	-
Transfer Masuk (Penerimaan ATR)	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
Revaluasi Aset	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi kesalahan input IP	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>18,309,414,391</b>
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	3,239,103,659
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>15,070,310,732</b>

Pada periode tahun 2024 Balai Diklat Aparatur tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan.

**Jalan, Jaringan dan Irigasi**

*Rp3.359.729.000,-*

**C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.359.729.000 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.359.729.000,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember

2024 sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>3,359,729,000</b>
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi Aset	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>3,359,729,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	1,595,115,034
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>1,764,613,966</b>

Pada saldo Jalan, Irigasi dan Jembatan Balai Diklat Aparatur Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang

*Aset Tetap  
Lainnya*

*Rp125.368.000,-*

### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp125.368.000,00 dan Rp125.368.000,00.

Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro kartografi naskah dan lukisan dan alat bercorak kebudayaan.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>125,368,000</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>125,368,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(54,925,000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>70,443,000</b>

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0,00*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp15.144.971.892)*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah (Rp15.144.971.892,00) dan tahun 2023 adalah masing-masing (Rp12.808.714.999,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

#### **Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10,816,057,285	9,382,544,287	1,433,512,998
2	Gedung dan Bangunan	18,309,414,391	3,239,103,659	15,070,310,732
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,359,729,000	1,595,115,034	1,764,613,966
4	Aset Tetap Lainnya	125,368,000	54,925,000	70,443,000
<b>Jumlah</b>		<b>32,610,568,676</b>	<b>14,271,687,980</b>	<b>18,338,880,696</b>

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp0,00*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

*Dana Yang  
Dibatasi  
Penggunaanya  
Rp58.614.500,-*

## C.22 Dana yang dibatasi penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaanya per 31 Desember 2024 senilai Rp58.614.500,00 dan 2023 adalah Rp0,00 .

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian DanaYang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	2024	2023
Pembayaran Jasa Keamanan (SATPAM) TA. 2024	34,008,337	-
Pembayaran Jasa Kebersihan TA.2024	24,606,163	-
	<b>58,614,500</b>	-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri dari dana pekerjaan yang belum selesai pada tahun 2024 yang ditampung dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Bendahara Umum Negara. Rincian pekerjaan yang belum selesai pada tahun 2024 adalah :

1. Pengadaan Jasa Keamanan (SATPAM) senilai Rp34.008.337,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.0006/BDA/PAN.PBJ/PL.421/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 dan sudah diserahkan hasil pekerjaannya melalui Berita Serah

Terima Pekerjaan Nomor 1060/BDA/PAN.PBJ/PL.420/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;

2. Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp24.606.163,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.0002/BDA/PAN.PBJ/PL.421/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan sudah diserahkan hasil pekerjaannya melalui Berita Serah Terima Pekerjaan Nomor 1056/BDA/PAN.PBJ/PL.420/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp0,00,-*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp140.137.000,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp0,00*

#### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp121.310.014,-*

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp121.310.814,00 dan Rp33.622.235,00 .

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### **Rincian Utang kepada Pihak Ketiga**

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-	-
Belanja Barang yang masih harus dibayar	121,310,814	33,822,235
Belanja Modal yang masih harus dibayar	-	-
<b>Total</b>	<b>121,310,814</b>	<b>33,822,235</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023, belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp.121.310.814,00 berupa

1. Belanja langganan listrik bulan Desember 2024 yang dibayar

pada bulan Januari 2025 senilai Rp62.696.314,00

2. Pengadaan Jasa Keamanan (SATPAM) senilai Rp34.008.337,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.0006/BDA/PAN.PBJ/PL.421/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 dan sudah diserahkan hasil pekerjaannya melalui Berita Serah Terima Pekerjaan Nomor 1060/BDA/PAN.PBJ/PL.420/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
3. Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp24.606.163,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.0002/BDA/PAN.PBJ/PL.421/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan sudah diserahkan hasil pekerjaannya melalui Berita Serah Terima Pekerjaan Nomor 1056/BDA/PAN.PBJ/PL.420/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp9.923.200,-*

### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai 9.923.200,00 dan Rp0,00

Pendapatan Diterima di Muka pada Balai Diklat Aparatur merupakan pendapatan sewa diterima dimuka berupa pendapatan sewa gedung dan bangunan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan yang digunakan oleh Koperasi RI Tirta Mulya Pegawai BDA KP, yang telah diterima dan disetor ke Kas Negara nomor NTPN : 8E0573CIFKFNING pada tanggal 2 Agustus 2024 yang merupakan sewa tanah dan bangunan oleh Koperasi Tirta Mulya.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0,00*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Ekuitas  
Rp52.285.204.223,-*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp51.763.679.182,00 dan 2023 adalah senilai Rp52.285.204.223,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

**D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 senilai Rp893.491.600,00 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp922.430.630,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak PER 31 Desember  
2024 dan 2023**

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	26,564,600	38,590,630	(31)
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi	23,200,000	4,800,000	383
Pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	843,727,000	879,040,000	
<b>Jumlah</b>	<b>893,491,600</b>	<b>922,430,630</b>	<b>(3.14)</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 berasal dari sewa tanah,gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan sewa rumah dinas yang disetor oleh pegawai dengan surat billing dari Aplikasi [www.simponi.kemenkeu.go.id](http://www.simponi.kemenkeu.go.id) dan yang langsung dipotong melalui SPM yang diajukan dari januari s.d desember 2024 senilai Rp26.564.600,00 ;
- b. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp23.200.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa asrama dari januari sampai dengan Desember 2024;
- c. Pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan pendapatan yang berasal dari peserta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional diluar lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Beban Pegawai** **D.2 Beban Pegawai**  
**Rp6.131.724.505,-**

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2024 senilai Rp.6.131.724.505,00 dan tahun 2023 adalah senilai Rp5.642.726.972,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Rincian Beban Pegawai**  
**PER 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,131,100,000	1,929,026,100	10.48
Beban Pembulatan Gaji PNS	29,863	25,442	17.38
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	200,043,560	187,318,890	6.79
Beban Tunj. Anak PNS	53,946,924	48,945,388	10.22
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	254,628,000	278,820,000	(8.68)
Beban Tunj. PPh PNS	30,305,232	12,165,336	149.11
Beban Tunj. Beras PNS	122,462,220	123,548,520	(0.88)
Beban Uang Makan PNS	239,185,000	261,088,000	(8.39)
Beban Tunjangan Umum PNS	45,920,000	46,260,000	(0.73)
Beban Uang Lembur	3,064,000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,026,466,532	2,730,329,296	10.85
Jumlah Belanja kotor	6,132,351,331	5,642,726,972	8.68
Pengembalian Belanja Pegawai	626,826	688	91,008.43
Jumlah Belanja	6,131,724,505	5,642,726,284	8.67

Jika dibandingkan dengan dengan Beban pegawai pada tahun anggaran 2024 dengan tahun anggaran 2023, maka pada tahun anggaran mengalami kenaikan nilai realisasi sebesar 8,67 persen.

Kenaikan realisasi beban pegawai sebesar 8,67 persen tersebut

diakibatkan adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 26 Januari.

### D.3 Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan  
Rp40.682.500,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2024 senilai Rp40.682.500,00 dan tahun 2023 adalah senilai Rp49.082.128,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jika dibandingkan beban persediaan per 31 Desember 2024 dengan 2023, maka pada per 31 Desember 2024 mengalami penurunan nilai sebesar 17,11 persen. Penurunan tersebut beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 dikarenakan berkurangnya anggaran belanja persediaan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Persediaan PER 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	40,682,500	49,057,128	(17)
Persediaan Bahan Baku	-	25,000	-
Beban Persediaan Lainnya			-
<b>Jumlah</b>	<b>40,682,500</b>	<b>49,082,128</b>	<b>(17.11)</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp6.342.991.010,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 senilai Rp6.342.991.010,00 dan tahun 2023 adalah senilai Rp5.035.983.607,00.

Jika dibandingkan antara beban barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2023, maka beban barang

dan jasa mengalami kenaikan nilai sebesar 25,95 persen. Kenaikan untuk beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2024 dikarenakan adanya penambahan anggaran pada operasional perkantoran dan anggaran pemanfaatan PNBPN pada layanan pendidikan dan pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Tahun Anggaran 2024.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa  
PER 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN JENIS BEBAN	TH.2024	TH.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	383,046,036	510,731,121	(25.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,956,500	3,095,600	(36.80)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73,074,000	125,352,000	(41.70)
Beban Barang Operasional Lainnya	128,181,530	217,548,360	(41.08)
Belanja Barang Operasional-Penanganan COVID-19	0	3,000,000	(100.00)
Beban Bahan	1,632,379,050	1,151,945,000	41.71
Beban Honor Output Kegiatan	5,168,000	8,160,000	(36.67)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,629,090,966	409,501,567	297.82
Beban Langganan Listrik	487,103,524	463,732,891	5.04
Beban Langganan Telepon	733,356	2,020,068	(63.70)
Beban Sewa	81,190,000	123,162,000	(34.08)
Beban Jasa profesi	661,860,000	701,700,000	(5.68)
Beban Jasa Lainnya	1,259,208,048	1,316,035,000	(4.32)
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>6,342,991,010</b>	<b>5,035,983,607</b>	<b>25.95</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Beban</b>	<b>6,342,991,010</b>	<b>5,035,983,607</b>	<b>25.95</b>

**Beban**  
**Pemeliharaan**  
**Rp2.149.939.646,**  
**-**

## **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 senilai Rp2.149.939.646,00 dan tahun 2023 adalah senilai Rp3.189.090.625,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

### **Rincian Beban Pemeliharaan PER 31 Desember 2024 dan 2023**

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,787,800,971	2,750,100,623	(34.99)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	348,240,288	414,990,002	(16.08)
Beban Pemeliharaan Jaringan	23,930,000	24,000,000	(0.29)
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>2,159,971,259</b>	<b>3,189,090,625</b>	<b>(32.27)</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>10,031,613</b>		
<b>Jumlah Beban</b>	<b>2,149,939,646</b>	<b>3,189,090,625</b>	<b>(32.58)</b>

**Beban**  
**Perjalanan Dinas**  
**Rp1.459.108.274,**  
**-**

## **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 senilai Rp2.149.108.274,00 dan tahun 2023 adalah senilai Rp712.509.944,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terdapat kenaikan beban perjalanan dinas dari tambahan anggaran pada pemanfaatan PNBPN pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pada BDA.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas  
PER 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	756,819,407	697,599,944	8.49
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,060,000	16,500,000	82.18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	676,663,867		
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>1,463,543,274</b>	<b>714,099,944</b>	<b>104.95</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>4,435,000</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1,459,108,274</b>	<b>714,099,944</b>	<b>104.33</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp.0,00*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi tidak terdapat beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Per 31 Desember 2023. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
PER 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Beban Bantuan Sosial Rp.0,00**

### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### **Rincian Beban Bantuan Sosial**

#### **PER 31 Desember 2024 dan 2023**

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>% NAIK (TURUN)</b>
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.529.874.222,-**

### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 senilai Rp529.874.222,00 dan tahun 2023 adalah masing-masing senilai Rp1.132.430.157,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
PER 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	218,526,344	510,679,801	57.21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	240,611,237	481,222,471	50.00
Beban penyusutan Jalan dan Jembatan	2,770,417	6,442,015	56.99
Beban Penyusutan Irigasi	62,890,626	125,781,253	50.00
Beban Penyusutan jaringan	4,152,309	8,304,617	50.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tdk digunakan	923,289	-	0.00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>529,874,222</b>	<b>1,132,430,157</b>	53.21
Beban Amortisasi Software	-	-	0.00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0.00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	0.00
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>529,874,222</b>	<b>1,132,430,157</b>	53.21

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp10.316*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai minus Rp10.316,00 dan Rp10.316,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
PER 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	(10,316)	10,316	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>(10,316)</b>	<b>10,316</b>	0.00

## D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp17.769.061,-

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

### Rincian Kegiatan Non Operasional PER 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2023	2023	NAIK (TURUN) %
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus /(Devisit) Pelepasan Aset	6,857,434	0	0.00
Surplus /(Devisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Surplus /(Devisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,911,627	0	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>17,769,061</b>	<b>0</b>	

Pos Luar Biasa  
Rp0,00

## D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0

Surplus/Defisit  
LO  
Rp15.743.049.180,-

## D.13 Surplus /Defisit LO

Surplus/Defisit – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing Senilai Rp15.743.049.180,00 dan Rp14.839.403.119 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp51.763.679.182*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp51.763.679.182,00 dan Rp52.285.204.223,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Balai Diklat Aparatur KP per 1 Januari 2024

*Surplus (deficit)*  
*LO*  
*(Rp15.743.049.180)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai (Rp15.743.049.180,00) dan (Rp14.839.403.119,00)

Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset*  
*Rp0,00*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*  
*Rp0,00*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Selisih*  
*Revaluasi Aset*  
*Tetap Rp0,00*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan

2023 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp.0,00.

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0,00*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0,00 dan Rp.0,00

*Koreksi Lain-  
Lain Rp0,00*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp14.762.447.075*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp15.221.524.139,00 dan Rp14.762.447.075.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### **Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas**

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Diterima dari Entitas Lain	926,940,267	921,288,030
Ditagihkan ke Entitas Lain	16,094,636,856	15,662,520,200
Transfer Masuk	53,827,550	21,214,905
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		
<b>Jumlah</b>	<b>15,221,524,139</b>	<b>14,762,447,075</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Per 31 Desember 2024, DDEL senilai Rp.926.940.267,00 sedangkan DKEL senilai Rp16.094.636.856,00

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2024 senilai Rp53.285.204.223,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. dari total Rp0,00 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

*Kenaikan /  
Penurunan  
Ekuitas*

#### **E.5 Kenaikan / Penurunan Ekuitas**

Nilai Kenaikan dan Penurunan Ekuitas pada tanggal Per 31

*Rp.521.525.041,-* Desember 2024 senilai Rp521.525.041,00. dan 2023 adalah senilai Rp76.956.044,00

*Ekuitas Akhir*      **E.6 Ekuitas Akhir**

*Rp51.763.679.182*

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal Per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp51.763.679.182,00 dan tahun 2023 adalah senilai Rp52.285.204.223,00

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada Tahun Anggaran 2024 Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdapat 2 (dua) pekerjaan kontraktual yang menggunakan pembayaran dengan metode RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) yaitu:

1. Pengadaan Jasa Keamanan (SATPAM) senilai Rp34.008.337,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.0006/BDA/PAN.PBJ/PL.421/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 dan sudah diserahkan hasil pekerjaannya melalui Berita Serah Terima Pekerjaan Nomor 1060/BDA/PAN.PBJ/PL.420/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan telah dibayar dengan SPM No.0004T tanggal 2 Januari 2025 dan Sp2D no.259991301000724 tanggal 3 Januari 2024
2. Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp24.606.163,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.0002/BDA/PAN.PBJ/PL.421/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan sudah diserahkan hasil pekerjaannya melalui Berita Serah Terima Pekerjaan Nomor 1056/BDA/PAN.PBJ/PL.420/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan telah dibayar dengan SPM No.0005T tanggal 2 Januari 2025 dan SP2D No.259991301000723 tanggal 3 Januari 2025

### **F.2. TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK DAN APIP**

1. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun anggaran 2023, terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja pada pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang sedang melaksanakan Tugas Belajar. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara (melalui aplikasi SIMPONI) pada semester I tahun 2024, dengan Kode NTPN

No.**0D6D52G4VPHMTVTB** dan NTB No.**240404293174** tanggal setor 4 April 2024.

2. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 s.d 2024 No.T.286/ITJ.3/HP.110/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 terdapat temuan sebagai berikut:

a. Kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran pada pengadaan barang/jasa senilai Rp20.933.500 dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara dengan rincian sebagai berikut :

- Setoran dengan NTPN No.**294962G4VPOCD9TF** tanggal 27 Juni 2024 senilai Rp8.648.750,00 untuk pengembalian belanja pada pekerjaan pemeliharaan jalan sekitar (pengaspalan) pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur tahun anggaran 2023 ;
- Setoran dengan NTPN **9A14E48VVESE199P** tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp2.111.735,00 untuk pengembalian belanja pada pekerjaan pemeliharaan gedung kantor utama pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur tahun anggaran 2023;
- Setoran dengan NTPN No. **36B9C2G4VPNL78OL** tanggal 3 Juni senilai Rp151.142,00 untuk pengembalian belanja pada pekerjaan pemeliharaan ruang perpustakaan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur tahun anggaran 2023;
- Setoran dengan NTPN No. **B44770JUQMQRVBLA** tanggal 28 Juni 2024 senilai Rp8.734.163,00 untuk Pengembalian belanja pada pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan Mess Widyaiswara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur tahun anggaran 2024;
- Setoran dengan NTPN No.**357F31GCAH5BRA31** tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp1.287.450,00 untuk Pengembalian

belanja pada pekerjaan pemeliharaan Asrama Baronang pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur tahun anggaran 2024.

- b. Kelebihan pembayaran senilai Rp2.850.000,00 atas pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) pada tahun anggaran 2024 dan telah dilakukan tindak lanjut berupa pengembalian ke kas negara dengan bukti setoran NTPN No.**965985229QP58K0N** tanggal 30 Mei 2024 senilai Rp2.850.000,00.



4345.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5,500,000,000	5,483,026,119	55.45	5165	5165	Orang	100	Progres capaian output peserta pelatihan telah memenuhi target 100%
	Subtotal	15,615,261,000	16,109,730,295	103.17				100	
	Penyesuaian								
	Revisi DIPA (Tambahan Anggaran)	16,165,261,000	16,109,730,295	99.66					
	Pengembalian Belanja		15,093,439						
	<b>TOTAL</b>	<b>16,165,261,000</b>	<b>16,094,636,856</b>	<b>99.56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	



Penanggung Jawab UAKPA  
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

R. Irena, Mardhika, S. St. Pi, MM  
NIP. 197908162002121003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
**ESELON I** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12  
**SATUAN KERJA** : BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI 653526

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 2:06 PM

Halaman : 2

lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>16,165,261,000</b>	<b>16,094,636,856</b>	<b>(70,624,144)</b>	<b>99.56</b>	<b>15,703,761,000</b>	<b>15,662,520,200</b>	<b>(41,240,800)</b>	<b>99.74</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

Subang, 8 Mei 2025  
 Penanggung Jawab UAKPA  
**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI  
 R. Hernan Mahardhika, S. St. Pi, MM  
 PEMBINA Tk. I / IVb 197908162002121003

## NERACA

**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 653526 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
SUKAMANDI

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 2:07 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	0	2,063,250	(2,063,250)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(10,316)	10,316	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	2,052,934	(2,052,934)	(100.00)
Persediaan	3,200,000	4,135,000	(935,000)	(22.61)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>3,200,000</b>	<b>6,187,934</b>	<b>(2,987,934)</b>	<b>(48.29)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	33,494,218,000	33,494,218,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	10,816,057,285	12,169,081,025	(1,353,023,740)	(11.12)
Gedung dan Bangunan	18,309,414,391	18,309,414,391	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,359,729,000	3,359,729,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	125,368,000	125,368,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,802,942,755)	(15,144,971,892)	342,029,137	(2.26)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>51,301,843,921</b>	<b>52,312,838,524</b>	<b>(1,010,994,603)</b>	<b>(1.93)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	58,614,500	0	58,614,500	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>58,614,500</b>	<b>0</b>	<b>58,614,500</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>51,363,658,421</b>	<b>52,319,026,458</b>	<b>(955,368,037)</b>	<b>(1.83)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	121,310,814	33,822,235	87,488,579	258.67
Pendapatan Diterima Dimuka	9,923,200	0	9,923,200	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>131,234,014</b>	<b>33,822,235</b>	<b>97,411,779</b>	<b>288.01</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>131,234,014</b>	<b>33,822,235</b>	<b>97,411,779</b>	<b>288.01</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	51,232,424,407	52,285,204,223	(1,052,779,816)	(2.01)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>51,232,424,407</b>	<b>52,285,204,223</b>	<b>(1,052,779,816)</b>	<b>(2.01)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>51,232,424,407</b>	<b>52,285,204,223</b>	<b>(1,052,779,816)</b>	<b>(2.01)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>51,363,658,421</b>	<b>52,319,026,458</b>	<b>(955,368,037)</b>	<b>(1.83)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT ORGANISASI** : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0200 ) JAWA BARAT  
**SATUAN KERJA** : ( 653626 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
SUKAMANDI

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 2:07 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

Keterangan :

FINAL

Subang, 8 Mei 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
R. Hernan Mahardhika, SLPi, MM  
PEMBINA Tk. I / IVB 197908162002121003

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 653526 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 2:07 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,200,000	0
0.0	131111	Tanah	33,494,218,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,816,057,285	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	18,309,414,391	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	826,505,000	0
0.0	134112	Irigasi	2,249,335,000	0
0.0	134113	Jaringan	283,889,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	125,368,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,603,374,475
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,479,714,893
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	665,820,838
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	880,468,772
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	118,638,777
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	54,925,000
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	58,614,500	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	62,696,314
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	58,614,500
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	9,923,200
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	16,094,636,856
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	926,940,267	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	53,827,550
0.0	391111	Ekuitas	0	52,285,204,223
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,550,590
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,564,600
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	23,200,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	843,727,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,911,627
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,131,100,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	29,041	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	200,043,560	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	53,946,924	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	254,628,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	30,305,232	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	122,462,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	239,185,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	45,365,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	3,064,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 653526 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
SUKAMANDI

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 2:07 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,026,395,528	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	383,046,036	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,956,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73,074,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	128,181,530	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,632,379,050	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,168,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,629,090,966	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	487,103,524	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	733,356	0
3.0	522141	Beban Sewa	81,190,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	661,860,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,259,208,048	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,777,769,358	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	348,240,288	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	23,930,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	753,694,407	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,060,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	675,353,867	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	439,356,532	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	481,222,471	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,540,834	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	125,781,254	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,304,617	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	923,289	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	40,682,500	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	10,316
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	3,693,156	0
<b>JUMLAH</b>			<b>84,282,809,531</b>	<b>84,282,809,531</b>

Keterangan :

FINAL

Subang, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KP

R.Hernan Mahardhika, S.St.Pi,MM

PEMBINA Tk.I / IVb 197908162002121003

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0200 ) JAWA BARAT  
**SATUAN KERJA** : ( 653526 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
**SUKAMANDI**

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 2:05 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	893,491,600	922,430,630	(28,939,030)	(3.137)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	893,491,600	922,430,630	(28,939,030)	(3.137)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	893,491,600	922,430,630	(28,939,030)	(3.137)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,131,724,505	5,642,726,972	488,997,533	8.666
Beban Persediaan	40,682,500	49,082,128	(8,399,628)	(17.113)
Beban Barang dan Jasa	6,342,991,010	5,035,983,607	1,307,007,403	25.953
Beban Pemeliharaan	2,149,939,646	3,189,090,625	(1,039,150,979)	(32.585)
Beban Perjalanan Dinas	1,459,108,274	712,509,944	746,598,330	104.784
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0200 ) JAWA BARAT  
**SATUAN KERJA** : ( 653526 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR  
**SUKAMANDI**

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 2:05 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,061,128,997	1,132,430,157	(71,301,160)	(6.296)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(10,316)	10,316	(20,632)	(200)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>17,185,564,616</b>	<b>15,761,833,749</b>	<b>1,423,730,867</b>	<b>9.033</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(16,292,073,016)</b>	<b>(14,839,403,119)</b>	<b>(1,452,669,897)</b>	<b>9.789</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	6,857,434	0	6,857,434	
Pendapatan Pelepasan Aset	10,550,590	0	10,550,590	
Beban Pelepasan Aset	3,693,156	0	3,693,156	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,911,627	0	10,911,627	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,911,627	0	10,911,627	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>17,769,061</b>	<b>0</b>	<b>17,769,061</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(16,274,303,955)</b>	<b>(14,839,403,119)</b>	<b>(1,434,900,836)</b>	<b>9.67</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(16,274,303,955)</b>	<b>(14,839,403,119)</b>	<b>(1,434,900,836)</b>	<b>9.67</b>

Keterangan :  
FINAL

Subang, 8 Mei 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
R. Hermin Mahardhika, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA TK.17 IVb 197908162002121003



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT  
 SATUAN KERJA : ( 653526 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM  
 Tgl Cetak : 08/05/25 2:06 PM  
 Halaman : 1  
 lap\_be\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	52.285.204.223	52.362.160.267	(76.956.044)	(0.15)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.274.303.955)	(14.839.403.119)	(1.434.900.836)	9.67
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	15.221.524.139	14.762.447.075	459.077.064	3.11
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.052.779.816)	(76.956.044)	(975.823.772)	1.268.03
EKUITAS AKHIR	51.232.424.407	52.285.204.223	(1.052.779.816)	(2.01)

Keterangan :  
 FINAL

Sunang, 8 Mei 2025  
 Penanggung Jawab UAKPA  
**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
  
 R. Herlan Marandhika, S. St. Pl, MM  
 PEMBINA Tk. I / Ipb 197908182002121003